

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia, yang berorientasi kepada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk individu, sosial dan religius sehingga dapat meningkatkan martabatnya selaku makhluk. Dengan demikian, dalam ruang pembangunan manusia dianggap sebagai objek atau sasaran pembangunan.

Sebagai sasaran pembangunan, manusia harus mampu memanfaatkan, mengembangkan, menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi guna mewujudkan pembangunan kearah yang lebih maju. Untuk itu diperlukan suatu pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang potensial dan produktif.

Melalui pendidikan seseorang diberikan pengetahuan agar dapat memahami gejala-gejala yang terjadi dan juga diberikan keahlian yang berguna untuk kemajuan manusia. Selain itu, pendidikan juga diarahkan untuk mengarahkan, mendidik, mengembangkan dan menggali potensi dari calon-calon dari generasi penerus bangsa sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan dapat berkembang sesuai tuntutan zaman.

Pendidikan merupakan kegiatan universal dalam kehidupan manusia yang dapat berlangsung dalam ruang lingkup keluarga dan masyarakat. Menurut Redja Mudyahardjo (2001:11)

“pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan atau latihan yang telah berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang”.

Dari uraian di atas, pendidikan merupakan salah satu elemen penting bagi kehidupan manusia. Untuk itu, selain keluarga dan masyarakat, pemerintah juga dituntut berperan aktif dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas, yang nantinya akan berguna bagi pembangunan pada masa yang akan datang sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah mengusahakan pelayanan pendidikan secara merata bagi warga masyarakat Indonesia baik itu melalui jenjang pendidikan formal dan non formal.

Pelayanan pemerintah mengenai pendidikan secara merata pada jenjang pendidikan formal terlihat dari upaya pemerintah dalam merumuskan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar, yang menetapkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan 3 tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Adapun implementasi dari peraturan pemerintah tersebut adalah telah didirikannya bangunan sekolah dasar berdasarkan Instruksi Presiden (SD

INPRES), program bantuan beasiswa, bantuan operasional sekolah, dan juga pengadaan buku-buku sekolah secara gratis.

Dalam kenyataannya, program pemerintah untuk mensukseskan pendidikan formal di Indonesia belum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, karena sampai saat ini fenomena-fenomena anak yang mengalami putus sekolah atau *droup out* dari tingkat Sekolah Dasar ke tingkat SLTP masih saja ada. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Selain itu, keadaan krisis ekonomi yang melanda Indonesia selama sepuluh tahun belakangan ini juga ikut berperan penting terhadap terpuruknya sosial ekonomi di dalam keluarga terutama pada keluarga yang keadaan ekonominya di bawah standar karena krisis tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan anak akan pendidikan, baik itu berupa anggaran biaya pendidikan maupun fasilitas-fasilitas pendukung yang menunjang keberhasilan anak dalam melaksanakan pendidikan seperti makanan yang bergizi dan suasana belajar yang kondusif.

Dalam situs <http://hizbut-tahrir.or.id>, di ungkapkan bahwa “dari aspek pendidikan 1,8 juta anak SD berusia 7-12 tahun dan 4,8 juta anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah, dan sebanyak 26 juta anak usia SD putus sekolah, selain itu 16 juta anak diatas usia 10 tahun tergolong buta huruf”.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2008 Provinsi Lampung, jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah 7.391.128 jiwa, dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebesar 945.492 jiwa dan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebesar 443.124 jiwa. Adapun komposisi penduduk menurut jenis usia sekolah dari 11

kabupaten yang ada di provinsi Lampung, akan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah penduduk dan penduduk usia sekolah provinsi lampung tahun 2008-2009

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk seluruhnya	Penduduk usia 7-12 tahun	Penduduk usia 13-15 tahun
1	Bandar Lampung	822.880	98.880	39.120
2	Lampung Selatan	1.089.358	112.076	56.062
3	Lampung Tengah	1.177.967	142.830	70.340
4	Lampung Utara	567.164	80.437	39.131
5	Lampung Barat	383.818	51.415	23.675
6	Tulang Bawang	787.673	110.391	47.607
7	Tanggamus	830.777	109.218	54.347
8	Lampung Timur	947.193	117.768	55.934
9	Metro	134.162	14.602	8.489
10	Way Kanan	364.778	51.403	25.828
11	Pesawaran	285.358	56.472	22.591
	Jumlah	7.391.128	945.492	443.124

Sumber:Rangkuman Data Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008(RPdd-04) atau data dari

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Adapun data mengenai anak putus sekolah atau *droup out* berdasarkan tingkat SD dan Tingkat SLTP menurut Departemen Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Putus Sekolah atau *Droup Out* Tingkat SD dan SLTP Provinsi Lampung tahun 2008-2009

No	Kabupaten/Kota	Putus Sekolah SD			Putus Sekolah SLTP		
		SD	MI	Jumlah	SLTP	MTS	Jumlah
1	Bandar Lampung	82	18	100	292	5	297
2	Lampung Selatan	273	215	488	354	73	427
3	Lampung Tengah	275	35	310	275	518	793
4	Lampung Utara	38	14	52	156	169	325
5	Lampung Barat	190	17	207	154	57	211
6	Tulang Bawang	932	42	974	309	126	435
7	Tanggamus	212	75	287	213	26	239
8	Lampung Timur	263	109	372	389	197	586
9	Metro	5	5	10	26	3	29
10	Way Kanan	290	39	329	52	87	139
11	Pesawaran	185	34	219	22	16	38
	Jumlah	2.745	603	3.348	2.242	1.277	3.519

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Berdasarkan kedua tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 11 Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, jumlah penduduk usia sekolah antara usia 7-12 tahun yang harus mengalami *droup out* sebesar 3.348 jiwa atau 0,4% dan pada usia 13-15 tahun sebesar 3.519 atau 0,8% dari jumlah penduduk usia sekolah pada usia tersebut. Dari persentase tersebut jumlah anak putus sekolah di Provinsi Lampung memang masi cenderung sedikit namun tetap dibutuhkan perhatian yang kompleks dalam menangani permasalahan tersebut.

Melihat masih adanya anak yang mengalami putus sekolah atau *droup out* yang yang kemungkinan disebabkan oleh faktor ekonomi, dan faktor sosial membuat pemerintah menyadari bahwa dunia pendidikan saat ini tidak terlepas dari peranan uang. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah terutama Departemen Pendidikan Nasional memusatkan perhatiannya pada jenjang pendidikan non formal atau

informal, dengan menyelenggarakan program kesetaraan paket A (setara dengan Sekolah Dasar), paket B (setara dengan SLTP), dan paket C (setara dengan SLTA). Program kesetaraan merupakan langkah yang sangat strategis dalam rangka pemberian bekal pengetahuan dan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dimana penyelenggaraan program ini ditujukan bagi masyarakat putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah-daerah khusus, seperti daerah perbatasan, daerah bencana, dan daerah yang terisolir yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai bahkan juga bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan calon TKI.

Meskipun pemerintah telah memberikan jalan keluar dengan diadakannya program kesetaraan, permasalahan muncul dari sikap orangtua yang kurang memiliki kesadaran untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk bersekolah atau melanjutkan sekolah padahal mereka merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas perkembangan anak baik fisik maupun psikis.

Dari fenomena yang ada, keadaan ekonomilah yang lebih dominan dalam mempengaruhi minimnya tingkat kesadaran orangtua mengenai pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan terutama pendidikan formal di sekolah dan juga adanya persepsi negatif orangtua dalam melihat pendidikan. Mereka menganggap pendidikan tidak penting karena banyak kasus yang muncul, dalam memperoleh pekerjaan ternyata seseorang yang tamatan SD mempunyai pekerjaan yang tidak terlalu berbeda dengan yang tamat SMA.

Bagi keluarga yang ekonominya di bawah standar, ketika mereka memiliki uang maka mereka akan lebih mendahulukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibandingkan harus menyekolahkan anaknya karena dalam implementasinya, meskipun program pemerintah telah memihak bagi keluarga miskin, ternyata pendidikan selalu saja berkaitan dengan uang.

Ketika sosial ekonomi menjadi faktor utama anak tidak memiliki kesempatan dalam memperoleh pendidikan, maka anak dipandang sebagai faktor produksi yang harus berperan aktif untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga dengan cara masuk angkatan kerja, sebagaimana yang diungkapkan Bellamy dalam Ananta (2004:149) bahwa “kekuatan yang paling kuat mendorong anak-anak ke dalam lingkungan pekerjaan yang membahayakan dan melemahkan adalah eksploitasi terhadap kemiskinan”. Dengan adanya faktor ini, mau tidak mau anak terpaksa ikut serta bekerja.

Salah satu kesempatan untuk menambah penghasilan dengan tingkat pendidikan, pengetahuan, modal, keahlian, dan keterampilan yang terbatas adalah bekerja di sektor informal. Pekerjaan ini tidak hanya dilakukan oleh penduduk usia kerja saja melainkan anak-anak di bawah usia kerja yang terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pekerjaan sektor informal yang banyak diminati pekerja anak adalah menjadi pekerja rumah tangga, karena merupakan lapangan pekerjaan yang mudah ditemukan dan tidak membutuhkan persyaratan formal. Banyak orang yang percaya bahwa bekerja sebagai pekerja rumah tangga merupakan jalan yang

mudah bagi anak untuk keluar dari kemiskinan. Pekerja anak yang bekerja di sektor rumah tangga disebut pekerja rumah tangga anak (PRTA).

Bekerja sebagai pekerja rumah tangga merupakan jenis pekerjaan yang tidak terlalu mudah untuk dikerjakan pada usia anak karena membutuhkan energi yang cukup untuk mengerjakan kegiatannya. Biasanya pekerjaan sehari-hari yang dilakukan PRTA adalah melakukan pekerjaan domestik, seperti mencuci, mengasuh anak, memasak, membersihkan rumah. Kehadiran pekerja rumah tangga anak biasanya direkrut melalui jalur resmi seperti agen dan yayasan atau melalui jalur informal seperti melalui keluarga, kerabat, tetangga dan lain-lain.

Eksistensi pekerja rumah tangga anak cukup besar dan tersebar pada hampir seluruh keluarga kelas menengah di Indonesia bahkan cenderung meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Jurnal Perempuan (2005:51), menyatakan bahwa Survei Modul Kependudukan tahun 2001 mencatat bahwa jumlah Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia mencapai 570.059 jiwa dan 26,7 persen di antaranya (154.184 jiwa) adalah pekerja rumah tangga anak. Pada tahun 2003, *International Labour Organization* (ILO) bekerjasama dengan Jurusan Kesejahteraan Sosial Fisip UI mengungkapkan bahwa jumlah PRTA mencapai 688.132 jiwa atau 34,84 persen dari jumlah total 2.593.399 jiwa PRT yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun data jumlah pekerja rumah tangga di Sumatera menurut ILO pada tahun 2003 dalam jurnal perempuan yaitu:

Tabel 3. Hasil *International Labour Organization* (ILO) Jumlah PRT di Sumatera

Provinsi	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah PRT	Persentase PRT terhadap rumah tangga(%)	Jumlah PRTA	Persentase PRTA terhadap PRT (%)
Sumatera Utara	2.480.267	36.129	1.46	4.202	15.27
Sumatera Barat	949.721	22.911	2.42	9.471	54.29
Riau	1.066.060	37.819	3.55	9.756	33.88
Jambi	553.470	4.040	0.73	692	22.50
Sumatera Selatan	1.516.105	38.416	2.53	14.293	48.87
Bengkulu	321.591	17.559	5.46	9.185	68.70
Lampung	1.518.256	60.491	3.98	16.968	36.86
Bangka Belitung	215.012	783	0.36	0	0.00
Jumlah	8.620.482	218.148	2.56	64.567	35.04

Sumber: Survei ILO IPEC tahun 2003

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Lampung termasuk pada urutan pertama di Wilayah Sumatera yang memiliki jumlah pekerja rumah tangga terbanyak, dimana terdapat 60.491 jiwa pekerja rumah tangga usia dewasa dan 16.968 jiwa pekerja rumah tangga usia anak.

Sungguh miris melihat banyaknya usia anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga anak karena ketika mereka terpaksa memilih untuk bekerja maka kesempatan bermain, tumbuh kembang dan akses kesehatan, komunikasi dan informasi, istirahat dan rekreasi, berpartisipasi secara aktif dalam mengemukakan pendapatnya, bahkan kesempatan untuk belajar, pelatihan dan memperoleh pendidikan akan berkurang bahkan hilang padahal pendidikan sangat berguna untuk masa depan anak.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh *human right watch* dari 44 pekerja anak di Indonesia yang diwawancarai mengenai kesempatan pendidikan, hanya satu yang diperbolehkan menghadiri sekolah formal oleh majikannya (<http://hrw.org/Indonesian/docs/2005/>).

Dari uraian ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti apa saja faktor-faktor yang menghambat kesempatan pendidikan pekerja rumah tangga anak mengingat Pemerintah telah menyelenggarakan program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C yang difokuskan pada masyarakat yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan formal.

Tabel. 4 Jumlah Penduduk Dan Penduduk Usia Sekolah Kelurahan Negeri Besar Tahun 2008-2009

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk Seluruhnya	Penduduk Usia 7-12 tahun	Penduduk Usia 13-15 Tahun
1	Negeri Besar	2335	368	163
2	Tiuh Baru	1942	347	171
3	Kiling-Kiling	1554	352	159
4	Kali Awi	1201	312	184
	Jumlah	7.032	1379	677

Sumber: Rangkuman Data Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008 Atau Data Dari Kelurahan Negeri Besar

Adapun data mengenai pekerja rumah tangga anak (PRTA) menurut hasil observasi PKPA Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel. 5 Hasil Observasi PKPA (2008) Jumlah PRTA Di Negeri Besar

No.	Pendidikan	Jumlah PRTA Seluruhnya	Jumlah PRTA Usia 7-12 tahun	Jumlah PRTA Usia 13-15 Tahun	Persentase (%)
1	Masih Sekolah	11	3	8	9%
2	Tidak Bersekolah	43	10	33	83%
3	Tidak Tamat SD	10	4	6	8%
	Jumlah	64	17	47	100%

Sumber: hasil observasi PKPA 2008

Berdasarkan hasil observasi PKPA (2008) dapat disimpulkan bahwa:

1. Adanya anak-anak perempuan dari berbagai Kecamatan Negeri Besar maupun dari luar Kecamatan Negeri Besar seperti dari Lampung Utara, bekerja sebagai pekerja rumah tangga anak (PRTA) untuk pekerjaan kerumah-tangga maupun mengasuh anak.
2. Selama 26 hari observasi, ditemukan 64 orang PRTA dengan variasi umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun.
3. Sebanyak 11 orang (9 persen) masih sekolah dan 43 orang (83 persen) tidak bersekolah, diantaranya 10 (8 persen) orang tidak menamatkan sekolah dasar.
4. Hanya sembilan orang dalam observasi yang ditemukan berasal dari Kecamatan Negeri Besar. Selebihnya berasal dari desa-desa di 13 kabupaten/kota di Way Kanan (53 orang), serta 8 orang berasal dari luar Kabupaten Way Kanan yaitu Lampung Utara (tujuh orang), Palembang (dua orang). (<http://www.lbh-apik.or.id/fact-62%20PRTA.htm>)

Dari fenomena diatas masih banyaknya pekerja rumah tangga anak (PRTA) yang memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut : Apa saja faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan pekerja rumah tangga anak di kelurahan Negeri Besar?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan pekerja rumah tangga anak di kelurahan Negeri Besar .

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu sosial pada khususnya sosiologi yang berkaitan dengan masalah sosial dan dapat dijadikan bahan masukan untuk proses penelitian yang akan datang berhubungan dengan masalah sosial khususnya masalah pekerja rumah tangga anak.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan muncul beberapa rekomendasi solusi pemerintah, orangtua pekerja rumah tangga anak.